



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI
TAHUN 2026**

**BAWASLU KABUPATEN BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

SUB BAGIAN PENGAWAS PEMILU DAN HUMAS

Nomor SOP	11/TI.02.00/GO-01/06/2026
Tanggal Pembuatan	10 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal evelatif	
Di sahkan Oleh	
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang <u>Keterbukaan Informasi Publik</u>. - UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (serta perubahannya dalam UU No. 7 Tahun 2023). - Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2018 mengatur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) - Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota (sekarang Bawaslu Kabupaten/Kota), hingga Pengawas Pemilu Luar Negeri	- Memahami standar pelayanan public - Mampu mengelola Administrasi Dokumen
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	- Perangkat Komputer - Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Di simpan dalam bentuk tercetak dan dokumen

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	90 Menit	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 Menit	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian						90 Menit	Rekap Peraturan Perundang-Undangan	
4	Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 Menit	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	120 Menit	Lembar Uji Konsekuensi	
6	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	30 Menit	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	